

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KETENAGAKERJAAN**

Oleh:

DR. BOMER PASARIBU, SH., SE.,MSc.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN*

DR. BOMERPASARIBU, SH., SE.,MSc.**

I. MENGGESER PARADIGMA NEOLIBERAL

Sejak Indonesia merdeka, masalah ketenagakerjaan secara terus menerus telah menjadi problem yang berkepanjangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonominya untuk menyerap tenaga kerja yang cukup besar jumlahnya dan meningkat relatif cukup tinggi setiap tahunnya (*Labor Surplus Economy*). Walaupun dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (bahkan disebut sebagai salah satu negara yang mengalami “miracle ekonomi” sampai dengan tahun 1996, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7.5 dari tahun 1970-1996), kondisi ketenagakerjaan (*Employment Crisis*) semakin nyata. Ini semua disebabkan belum pernah adanya model politik ekonomi yang bertumpu pada optimalisasi *human capital* khususnya kesempatan kerja (*Employment based Economy*).

Krisis ketenagakerjaan ini semakin lebih diperburuk lagi oleh krisis moneter tahun 1997. Krisis moneter tersebut telah mengakibatkan terpuruknya perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 1997-1999 . Krisis moneter tersebut meluas menjadi multi krisis yang mencakup krisis ekonomi, politik, keamanan, pemerintahan, hukum, kepercayaan, sosial, bahkan krisis moral (*moral hazard*) sehingga *good governance* makin jauh, yang secara keseluruhan menurunkan dan memperparah krisis ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun drastis dari 7.28% tahun 1996, menjadi 4,7% pada tahun 1997, kemudian -13.20% pada tahun 1998, dan 0.23% pada tahun 1999. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut secara nyata telah menyebabkan merosotnya permintaan agregat dan kelesuan pasar, yang selanjutnya menimbulkan banyak perusahaan terpaksa menutup atau menciutkan kegiatan usahanya. Disamping itu, daya tarik di dunia investasi juga berkurang sebagai akibat krisis kepercayaan para pengusaha terhadap keberhasilan pemerintah mengatasi kasus-kasus konflik dan keamanan di berbagai wilayah, seperti di Aceh, Maluku, Irian Jaya, dan terakhir sekali di Kalimantan Barat. Tidak dapat dipungkiri bahwa akumulasi krisis ketenagakerjaan merupakan turunan pertama dampak krisis ekonomi serta krisis *social capital*.

Krisis ketenagakerjaan ini selanjutnya telah menurunkan pendapatan masyarakat dan sudah barang tentu mengakibatkan penurunan kualitas pembangunan manusia serta peningkatan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan laporan dari PBB untuk program pembangunan (UNDP Report tahun 1997 dan tahun 2000) krisis ekonomi di Indonesia telah mengakibatkan penurunan ranking indeks pembangunan manusia (*Human*

* Disajikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII, Bali, 14 -18 Juli 2003

** Direktur CLDS (*Centre for Labor and Development Studies*), Dosen Pascasarjana IPB, Bogor, Ketua IRDES (*Institute for Regional Development and Economic Studies*), dan Ketua Umum Himpunan Ahli Perencanaan Pembangunan Wilayah, mantan Menaker 1999-2000

Development Index) Indonesia dari urutan 99 pada tahun 1994 menjadi urutan 109 pada tahun 1998; serta penurunan ranking indeks kemiskinan manusia (*Human Poverty Index*) dari urutan 23 pada tahun 1994 menjadi urutan 46 pada tahun 1998. Data hasil SUSENAS yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan peningkatan penduduk miskin di Indonesia dari 34,5 juta pada tahun 1996 menjadi 37.5 juta orang pada tahun 1999. Bahkan menurut Bank Dunia berdasarkan ukuran baru *Internasional Poverty Line* (IPL) USD 2.001/hari jumlah kemiskinan mencapai 60 % atau 120 juta (2001) termasuk 10-20% miskin ekstrim. Angka kemiskinan di Indonesia tidak hanya meningkat secara nasional tetapi juga semakin timpang antar propinsi khususnya wilayah-wilayah propinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Adanya krisis ketenagakerjaan yang semakin serius akan menyebabkan keterpurukan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang yang dapat membuat bangsa Indonesia makin terbelakang dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Lebih parah lagi, krisis ketenagakerjaan ini dapat mengakibatkan krisis sosial, seperti meningkatnya tingkat kematian khususnya kematian bayi, meningkatnya kriminalitas, penggunaan narkoba, depresi, bunuh diri, perceraian, dan masalah-masalah demoralisasi lainnya.

Penanganan krisis ketenagakerjaan dan kemiskinan yang sudah sampai pada tahapan "lampu merah " mutlak diberikan prioritas tertinggi melalui reformasi politik ekonomi makro dan mikro serta reformasi politik ketenagakerjaan ke depan yang dihimpun pada "*Employment-based economy*". Untuk itu, "*Center for Labour and Development Studies Jakarta*" mengusulkan suatu reformasi besar (*big bang reform*) berupa *Grand Strategy* (pendekatan yang komprehensif integralistik) yang bertumpu pada kegiatan-kegiatan ekonomi basis penggunaan tenaga kerja / kesempatan kerja produktif (*employment-based economy*) menggeser pendekatan "Neoliberalis" seperti selama ini.

II. "TAHUN PENJARA DAN KERANJANG SAMPAH" ?

Dalam tahun 2002-2004 suasana "pemerintahan keranjang Sampah" (istilah Presiden Megawati sendiri) akan menghadapi siklus lingkaran setan krisis, terkait dalam prespektif ekonomi politik yang akan memasuki siklus ekonomi baru 2004. Tahun yang relatif paling memungkinkan didayagunakan secara optimal hanyalah tahun 2002 ini dan kuartal pertama tahun 2003. Tahun 2003 selanjutnya akan mulai memanas karena pertarungan politik menjelang Pemilu sistem baru. Sedangkan tahun 2004 pelaksanaan pemilihan umum serta dan pertarungan lembaga-lembaga politik termasuk pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Perebutan jabatan dalam kabinet baru, pertarungan elite politik DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan gabungannya di MPR, dan lain-lain akan membutuhkan penggunaan sumber daya dan energi dan biaya sangat mahal. Sehingga sumber daya, energi dan biaya yang seharusnya difokuskan bagi pemutihan ekonomi akan terkuras kedalam biaya pertarungan politik yang keras.

CLDS memperkirakan tahun 2002 - 2004 bila tidak ada kekompakan, "rekonsiliasi nasional" konsistensi kebijakan reformasi dan tidak terfokus pada pemulihan krisis, maka "Pemerintahan Keranjang Sampah", akan menghadapi lingkaran setan krisis, terpenjara oleh berbagai perangkap antara lain:

1. Perangkap Krisis Pengangguran Permanen (*Unemployment Trap Crisis*).

Diperkirakan tingkat total pengangguran akan terus membengkak bertambah satu setengah sampai dua juta pertahun sehingga bisa berpuncak pada ledakan sosial.

2. Perangkap Krisis Kemiskinan Permanen (*Poverty Trap Crisis*)

Diperkirakan akan semakin berat, selain karena meningkatnya tingkat pengangguran dan angka putus sekolah juga akibat dari terjadinya bencana La Nina (kebanjiran) 2002 dan El Nino (kekeringan) 2003 yang bisa menimbulkan krisis pangan.

3. Perangkap Hutang dalam dan luar negeri (*Debt Trap Crisis*)

Baik hutang pemerintah dan swasta yang berjumlah sekitar Rp. 2,3 trilyun. Krisis hutang ini menimbulkan krisis fiskal yang semakin berat dalam bentuk besarnya beban pembayaran cicilan dan hutang pokok. Hutang Pemerintah D/LN US\$ 141 Milyar, Swasta D/LN US\$ 85 Milyar (jumlah US\$ 226 Milyar).

4. Perangkap resiko investasi dan ekonomi yang cenderung meningkat (*Country Risk*).

Country Risk karena suasana ketidakpastian, kerusakan dalam supremasi hukum, keamanan, semakin merajalelanya pertarungan politik, tidak terfokusnya pelaksanaan agenda reformasi. Termasuk kegagalan dan berakhimya eksistensi BPPN tahun 2004 dengan prestasi terburuk di dunia. BPPN akan mewariskan terbengkalainya penuntasan program rekapitalisasi dan restrukturisasi, hutang-hutang konglomerat, dan kegagalan kebijakan mikro ekonomi lainnya dan hilangnya kepercayaan pasar (*market confidence*), mewariskan bom waktu dan lingkaran setan krisis.

5. Perangkap KKN baru (*New Crony, Corruption and Colutionism Trap Crisis*).

Jika zaman Soeharto, Indonesia menduduki urutan ke-8 negara terkorup di dunia (1996), pada era reformasi meledak menjadi urutan ke-4 (2001). CLDS mengobservasi ditengah retorika pemberantasan justru KKN makin merajalela sehingga diperkirakan melejit ke urutan ke-2 atau 3 pada 2003 dan 2004 akan bisa menimbulkan huru-hara sosial apalagi akan bersinggungan dengan pertarungan politik menjelang dan pada saat pemilu 2004.

Bekerja adalah hak dasar yang paling asasi sekaligus merupakan bagian dari harkat martabat manusia. CLDS memperkirakan total pengangguran yang terdiri dari pengangguran resmi (*open unemployment*), pencari kerja (*job seekers*), dan setengah pengangguran (*underemployment*) yang pada tahun 2001 diperkirakan berjumlah 40,2 juta akan terus membengkak pada 2002 s/d 2004. Diperberat karena semakin meningkatnya angka putus sekolah menjadi \pm 1,7 juta pertahun (naik 32%) dimana 53% di antaranya akan memasuki pasar, dan timbulnya bencana banjir dan kekeringan (La Nina & El Nino).

Untuk itu CLDS sekali lagi mengusulkan agar pemerintah segera secara terfokus terukur dan terjadwal melaksanakan reformasi besar (*big bang reform*) berpihak rakyat banyak. Terutama tidak lagi secara membabi buta mengikuti pendekatan "*Neo-liberalism*"

melainkan perlu dikombinasikan dengan pendekatan "*institutional economy*", di mana peranan ekonomi politik pemerintah dan pasar secara sinergik dan berpihak rakyat diprogramkan dan diimplementasikan secara pasti termasuk *affirmative action*. Kiranya dengan cara seperti ini apa yang diperintahkan oleh GBHN dan Tap MPR sebagai "Ekonomi Kerakyatan" bertumpu "Ekonomi Pasar Berkeadilan" dapat secara bertahap diwujudkan dan diimplementasikan secara konkrit, bukan hanya slogan.

III. KRISIS KETENAGAKERJAAN (*UNEMPLOYMENT CRISIS*)

Krisis ketenagakerjaan khususnya pengangguran dan kemiskinan akan benar-benar berada pada suasana lampu merah dan tanpa pelaksanaan agenda penanganan yang berhasil, akan bisa menimbulkan ledakan sosial apalagi akan bersinggungan dengan pertarungan politik menjelang dan pada saat pemilu 2004. Bekerja adalah hak dasar yang paling asasi sekaligus merupakan bagian dari harkat martabat manusia. CLDS memperkirakan total pengangguran yang terdiri dari pengangguran resmi (*open unemployment*), pencari kerja (*job seekers*), dan setengah pengangguran (*underemployment*) yang pada tahun 2001 diperkirakan berjumlah 40,2 juta akan terus membengkak pada 2002 s/d 2004. Diperberat karena semakin meningkatnya angka putus sekolah menjadi $\pm 1,7$ juta pertahun (naik 32%) dimana 53% di antaranya akan memasuki pasar, dan timbulnya bencana banjir dan kekeringan (La Nina & El Nino).

Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi 3,3% (2002), 3,0% (2003) dan 3,0% (2004) CLDS memperkirakan total pengangguran akan menjadi 40,1% atau 42 juta (2002), 41,2% atau 43,6 juta (2003) dan 42,5% atau 45,2 juta (2004). Lebih memprihatinkan lagi diantaranya, diperkirakan terdapat pembengkakan pengangguran terdidik lulusan perguruan tinggi, 1,830 juta (34%) 2001, 1, 199 Juta (35,1%) 2002, 2,415 juta (36%) dan 2,560 juta (37%), masing-masing tahun 2003, 2004.

Untuk itu "*big bang reform*" menuju kesempatan kerja penuh (*full employment*) perlu dijadikan program permanen oleh setiap Kabinet Pemerintah sebagaimana misalnya pemerintah Australia memprogramkannya secara permanen sejak 1945 dengan apa yang terkenal sebagai "White Paper 1945". Perubahan besar terhadap pendekatan tunggal selama ini dengan kebijakan regim ortodoks Neo-clasics, Neo-Liberalism yang bercenderung menekankan upah serendah-rendahnya sebagai keunggulan komparatif, *austerity policies*, menekankan *supply side* dan bukan *demand side* dll, pada hakekatnya menjadikan kesempatan kerja hanya sekedar hasil akhir atau sampingan dari pertumbuhan ekonomi, terbukti telah gagal dalam mengatasi krisis ketenagakerjaan dan pengangguran. Terbukti pada saat Bank Dunia memuji-muji Indonesia sebagai salah satu keajaiban ekonomi dunia (*miracle economy*) sampai dengan 1990-an justru pada saat yang sama krisis pengangguran terus semakin membengkak di mana kaum pekerja terus menerus dimarginalisasi.

Kesalahan besar selama ini hingga pemerintahan sekarang adalah tidak pernah menghitung betapa luar biasa besarnya biaya pengangguran (*cost of unemployment*), tidak hanya biaya ekonomi tetapi juga sosial dan politik yang mempraktekkan sendi ekonomi dan memperparah krisis.

Kebijakan Neo-Liberalis seperti itu sudah harus segera direformasi dengan pendekatan baru reformasi politik ketenagakerjaan terfokus pada kesempatan kerja penuh (*full employment*), berbasis *Institutional Economy* dan *Keynesian* disinergi dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan bertumpu Ekonomi Pasar Berkeadilan. Kebijakan ini lebih bertumpu pada aspek *demand side, aggregative demand*, menjadikan kesempatan kerja melekat sebagai bagian penting dari setiap mata rantai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi, bukan sebagai hasil akhir atau sampingan (*employment-based economy*). Diwujudkan dalam berbagai bentuk program langsung atau tidak langsung seperti reformasi pasar kerja aktif, berbasis sumber daya (*resource based*), masyarakat luas (*community based*) dan berfokus kepada ramah pasar (*market friendly*) dan berkesinambungan (*sustainable*). Selanjutnya diturunkan menjadi program operasional seperti reformasi pasar kredit dengan membangun kredit mikro perkotaan dan pedesaan seperti model Graemen Bank yang telah sukses di 22 negara; Reformasi pasar lahan (*land market reform*) semacam implementasi land reform; juga “aqua reform” untuk menjadi lahan perairan dan lautan bagi nelayan pemberian saham bagi pekerja perusahaan (*employee share ownership program (ESOP)*) untuk menjamin kesetiaan dan peningkatan produktivitas pekerja pada perusahaan yang telah juga menjadi miliknya melalui ESOP. Sedangkan reformasi lainnya mencakup kebijakan investasi dan teknologi berbasis employment (*employment based investment and technology*). Kebijakanen, *employment-based economy* ini telah sukses di RRC sehingga tingkat penganggurannya termasuk terkecil di dunia hanya 3,1% (1997) dan berhasil menguasai pasar dunia dari produk -produk usaha rakyat.

IV. STRATEGI PERENCANAAN DAN EKONOMI POLITIK BARU PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dengan terjadinya multi krisis dan reformasi besar-besaran (*big bang reform*) khususnya setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945, telah menimbulkan tuntutan perubahan mendasar dan berimplikasi sangat luas. Perubahan besar menyangkut sistem perencanaan program pembangunan dan ekonomi politik baru merupakan *conditio sine qua non* bagi pemulihan krisis dan kebangkitan kembali.

Khusus 3 perubahan besar, yaitu:

1. Hilangnya peran MPR sebagai tertinggi negara penentu arah pembangunan.
2. Hilangnya GBHN sebagai “induk” politik pembangunan dan ekonomi politik.
3. Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, sehingga bukan lagi Mandataris MPR yang melaksanakan Tap-Tap dan bertanggung jawab kepada MPR.

Telah menimbulkan sejumlah tuntutan perubahan *system and institution building*. Untuk menjawab masalah:

Apakah akan hilang atau diganti :

1. Sistem pembangunan berencana dan berkelanjutan (*sustainable development*)?
2. PJP (Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang)?

3. Repelita Nasional dan Daerah?
4. Propenas/Propeda?
5. Lembaga perencanaan Bappenas/Bappeda?
6. Program pembangunan apa yang dijalankan pemerintah baru hasil Pemilu 2004 (Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD dan MPR baru)?
7. Apakah setiap partai politik dan calon Presiden/Wakil Presiden benar-benar siap dengan Perencanaan Pembangunan masing-masing yang akan dilaksanakan bila menang?
8. Siapa pengambil keputusan dan bagaimana konsensus politik nasional dapat diwujudkan dalam bentuk Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) dan panjang sesuai dengan siklus pemerintahan dan pemilu?

Agaknya kita belum siap untuk menjawab *big bang reform* tersebut sehingga sangat boleh jadi menimbulkan kevakuman, bom waktu dan transisi berkepanjangan di tengah-tengah euphoria reformasi sehingga dapat menimbulkan krisis berkepanjangan (*vicious circle of crisis*).

A. EKONOMI POLITIK BARU

Big bang reform membutuhkan pengembangan sistem ekonomi politik baru dengan paradigma baru. Sinergi *market economy* dengan:

- Neo Institutional Economy
- Neo Political Economy

Dibutuhkan kemampuan tinggi untuk membangun sistem baru perencanaan pembangunan berkelanjutan dengan berbagai kombinasi sinergik yang makin kompleks khususnya antara ekonomi pasar bebas dengan 2 pendekatan tersebut di atas.

Pertama: NEW (MODERN) INSTITUTIONAL ECONOMICS

1. Transaction – Cost Economics:

- a. Information costs
- b. Bargaining and decision costs
- c. Policy and enforcement costs

2. Property – Rights: Analysis:

Utilitation of scarce resources

Allocation of property rights incentives

3. Economic Theory of Contracts:

Incentive and asymmetric information problems between:

- The parties to a contract
- The contractual parties on one side and a third party, eg. The court on the other

a. Agency Theory

i. The problems of asymmetric information between contractual parties

1. Positive Agency Theory
2. Normative Agency Theory

b. Relational and Incomplete Contract Theory

The Principal Agent Model:

- i. Moral Hazard
- ii. Adverse Selection

4. The New Institutional Approach to Political Economics

* Political Market * Public Policy * Rational Choice

5. Constitutional Economics

- a. Public/Collective Choice
- b. Legal-Institutional-Constitutional Rules

6. The New Institutional Approach to Economic History

Transaction cost, Property rights, and Contractual relationship to historical experience

Kedua: NEW POLITICAL ECONOMICS

1. Kajian Negara Masyarakat dan Pasar
2. Alokasi Distribusi dan Kepemilikan menurut Sistem Ekonomi
 - a. Kapitalis murni
 - b. Etatisme kapitalis
 - c. Kapitalis campuran
 - d. Sosialis murni
 - e. Sosialisme pasar
3. Teori Birokrasi dan Peran Pemerintah
4. Ekonomi Politik Kelembagaan
5. Teori-teori tentang:
 - a. Barang dan jasa publik

- b. Public policy
 - c. Political market
 - d. Rational choice
 - e. Public choice/ Collective choice
 - f. Public economy
 - g. Planning theory
 - h. Transaction theory
 - i. Rent seeking and free riders
 - j. Democratic governance
 - k. Good governance
6. Konsep Pembangunan:
- a. Sosial ekonomi
 - b. Politik dan demokrasi, democratic governance
 - c. Strategi/perencanaan pembangunan
7. Politik dan Kualitas pertumbuhan Ekonomi (The Quality of Growth)
- a. Variabel ekonomi
 - b. Variabel politik
 - c. Variabel sosial sistem
 - d. Variabel ekosistem

B. TARIK MENARIK "MAIN STREAM"

1. NEO LIBERALISM

Dapat diikuti kritik Stiglitz dalam Globalism and Its Contents, 2002.

Banyak berkuasa di WTO, IMF dan MNC

- "Mempertuhankan" liberalisasi, globalisasi, kebebasan pasar berlebihan
- Meminimalisir peran negara
- Banyak ditentang kelompok pejuang HAM, pekerja, petani, lingkungan, pejuang gender keadilan dan para budayawan, agamawan, ilmuwan dan pejuang kaum marginal lainnya.

2. NEW INSTITUTIONALISM.

Kini sedang mulai melembaga sebagai Main Stream Baru

Dapat diikuti antara lain dalam tulisan Eirik G. Furubotn dan Rudolf Richter serta bandingkan dengan pandangan baru Anthony Giddens dalam The Third Way, 2000

Banyak berperan di ILO, FAO, dan sebagian di World Bank.

- Mensinergikan liberalisasi pasar dengan kelembagaan, sehingga kepentingan yang diperjuangkan berbagai pihak tersebut juga memperoleh perhatian.
- Affirmative Action (kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, ketidakadilan)
- Baik melalui mekanisme kelembagaan (sinegi Market Democracy dan Market Economy) Contoh: Model Employment-Based Economy.

“NEW-INSTITUTIONALISM” adalah jalan tengah, di antara ekstrim kanan “Neo-Liberalism” dan ekstrim kiri “Socialism”

V. SYSTEM AND INSTITUTIONAL BUILDING: PERENCANAAN DAN KELEMBAGAAN

A. Perlu dikembangkan pendekatan baru melalui konsensus politik Democratic Governance yang diwujudkan dalam segitiga pilar Good Governance, Political Governance dan Social Governance.

- 1) Revitalisasi dan reorientasi sistem politik pembangunan dan ekonomi politik baru (pengganti GBHN).
- 2) Memprogram reformasi secara terencana, terfokus, terukur, terjadwal dan berprioritas.
- 3) Untuk itu perlu dikembangkan sistem perencanaan pembangunan baru di segala bidang politik, ekonomi, sosial. dan lain-lain.
- 4) Memperkuat sistem dan model perencanaan di pusat dan daerah.

B. Pelembagaan Perencanaan Pembangunan

- 1) Perlu Undang-Undang Perencanaan Pembangunan (Nasional dan Daerah):
 - Repelita, Propenas/Propeda
 - Bappenas/ Dappemas, Bappeda/ Deppenda
- 2) Perlu pendidikan dan pengembangan ilmu tentang perencanaan pembangunan, ekonomi pembangunan, ekonomi kelembagaan dan ekonomi politik di universitas.
- 3) Perlu diseminasi system and institutional building baru kepada masyarakat politik khususnya para elit politik, partai politik, elit pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif di pusat dan di daerah.

C. Prasyarat suksesnya pembangunan berkelanjutan berdasarkan ekonomi politik baru.

- 1) Sustainable development memerlukan syarat stabilitas politik dan pemerintahan dengan "Equilibrium Baru".
- 2) Perlu membangun format baru dalam sistem "Multi Party" model konfederasi partai dengan platform, visi dan misi bersama.
- 3) Konfederasi partai permanen menjamin stabilitas dan mayoritas efektif di eksekutif dan legislative (model "Barisan Nasional" Malaysia bertumpu pada partai Melayu/UMNO, partai China/MCA, partai India/MIC dan lain-lain).
- 4) Contoh pilihan terbentuknya konfederasi partai dengan sistem Power Sharing, misalnya:

"POROS INDONESIA": GOLKAR, PDI-P, PKB"

D. Tujuan

- 1) Memprogramkan perwujudan:
AMANAT UUD-45 HASIL AMAMDEMEN
- 2) Setidaknya perlu adanya
PERNCANAAN JANGKA PENDEK DAN MENENGAH
 - Komprehensif
 - Integral: Nasional dan Regional
 - Memiliki kepastian dan kekenyalan
 - Indikatif, terfokus, terukur, terjadwal
 - Kombinasi/aspirasi: Bottom Up dan TopDown
 - Melipatgandakan peran dan partisipasi rakyat
- 3) Melalui 4 proses terus menerus
 1. Pembelajaran (Learning)
 2. Pemberdayaan (Empowering)
 3. Pelembagaan (Institutionalization)
 4. Pendemokrasian (Democralization)

VI. FOKUS EKONOMI POLITIK BARU: FULL EMPLOYMENT POLICY

A. Paradigma Baru:

- Integrasi penduduk dan pembangunan berpusat manusia
- The Quality of Growth
- Desentralisasi, otonomisasi

- Demokratisasi: Democratic Governance
- 1. Pilihan bukan "Population and development" yang terkait, tetapi "Population Centered Development" (PCD) yang terfokus.
- 2. Perencanaan PCD diturunkan kedalam perspektif dunia kerja dan pembangunan: "Employment-Based Development" (EBD).
- 3. Masalah-masalah:
 - Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketidakadilan
 - "Transisi demografis"
 - "Population trap" penduduk sebagai modal atau beban pembangunan – "Employment Crisis"
 - "Ecological Crisis" dengan segala antisipasi dan implikasinya dimasukkan dalam perencanaan.

B. EMPLOYMENT BASED ECONOMY (EBE)

1. Fokus: Full Employment (Kesempatan Kerja Penuh) Manusia sebagai titik sentral.
2. Pendekatan:
 - 1) Sinergi ekonomi pasar dan kelembagaan (Market Economy dan Institutional Economy)
 - 2) Mengoreksi Neo-Liberalism

3. Prioritas:

A. Sinergi Employment dan pendidikan

- | | | |
|--------------|----------|------------------------|
| 1) TRIE's: | Pertama: | Employment |
| | Kedua: | Employment |
| | Ketiga: | Employment |
| 2) Tris E's: | Pertama: | Education and Training |
| | Kedua: | Education and Training |
| | Ketiga: | Education and Training |

B. Sinergi Hubungan Industrial

3) Bipartit dan Tripartit

- | | | |
|------------------------|----------|-------------|
| Tri N's (Perundingan): | Pertama: | Negotiation |
| | Kedua: | Negotiation |
| | Ketiga: | Negotiation |

4. Reformasi Konkrit: Ekonomi politik, makro dan mikro (6)

C. POPULATION CENTRED DEVELOPMENT (PCD)

D. THE QUALITY OF GROWTH